

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 7 Nomor 4 Juni 2021. <https://doi.org/10.56015/governance.v7i4.15>
**UPAYA DINAS PENGELOLAAN PASAR DAN KEBERSIHAN KABUPATEN
BUNGO DALAM MENGATASI TINGGINYA TUNGGAKAN RETRIBUSI DI
PASAR BUNGUR KABUPATEN BUNGO**

Siti Maryam¹, Akhmad Legianto²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muara
Bungo, Jalan. Diponegoro 12 Muara Bungo, Provinsi Jambi
Email: sitimaryamumb201@gmail.com

ABSTRACT

The year-end report from the Market Management and Hygiene Service stated that user fees from the market are one of the local revenue sources that generate the most user fees. However, in achieving its realization, it is very difficult to achieve, this can be seen from the receipt of the Bungur Bungur market levy for the last 2 years. This paper aims to explore why there is an increase in retribution arrears. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Selection of informants using "purposive sampling". The results of the study found that the efforts made by the Department of Market Management and Hygiene of Bungo Regency in overcoming the high arrears of levies were by massively socializing and empowering the relevant local government apparatus in collecting retribution.

Keywords: *Effort, Arrears, Retribution, Socialization, Development.*

ABSTRAK

Laporan akhir tahun dari Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, retribusi dari Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menghasilkan pendapatan retribusi paling banyak. Namun dalam pencapaian realisasinya sangat sulit tercapai, hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi pasar bungur kabupaten bungo selama 2 tahun terakhir. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi mengapa terjadinya peningkatan tunggakan retribusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan menggunakan "purposive sampling". Hasil penelitian menemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo dalam mengatasi tingginya tunggakan Retribusi yaitu dengan melakukan sosialisasi secara masiv dan memberdayakan aparatur pemerintah daerah terkait dalam penagihan retribusi

Kata kunci: *Upaya, Tunggakan, Retribusi, Sosialisasi, Pembangunan*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bungo sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di provinsi Jambi terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah. Di antara bermacam-macam Retribusi Daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar, di mana retribusi pasar memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari berbagai macam sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Bungo, terdapat sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Dari golongan retribusi jasa umum terdapat jenis-jenis pelayanan diantaranya adalah retribusi pasar.

Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan kepada oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 tahun 2002

tentang retribusi pasar yang mengatakan bahwa retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.

Pasar Bungur Kabupaten Bungo merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di Kabupaten Bungo dimana memberikan kontribusi cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo merupakan lembaga atau organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola pemungutan retribusi pasar-pasar yang ada di Kabupaten Bungo. Sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengelola pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Bungo, maka pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo. Berdasarkan laporan akhir tahun dari Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, retribusi dari Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menghasilkan pendapatan retribusi paling banyak. Namun dalam pencapaian realisasinya sangat sulit tercapai, hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi pasar bungur kabupaten bungo selama 2 tahun terakhir sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1: Perincian penerimaan Target dan Realisasi Retribusi Pasar Bungur Kabupaten Bungo pada Tahun 2013-2014

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2013	78.000.000	69.400.410	89 %
2014	84.000.000	76.980.920	92 %

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, 2015

Berdasarkan tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemungutan retribusi Pasar Bungur belum optimal hal ini dapat dilihat pada tabel di atas dari tahun 2013-2014 realisasi retribusi pasar di Kabupaten Bungo khususnya Pasar Bungur tidak pernah memenuhi target. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah, antara lain kurang maksimal dalam proses pengelolaan pemungutan retribusi pasar, pengawasan pemungutan retribusi pasar, hingga adanya penunggakan bayaran dari pengguna fasilitas dan prasarana pasar.

Padahal dengan melihat potensi yang ada di Pasar Bungur yang begitu besar seharusnya dalam penerimaan terget dan realisasi dapat tercapai. Kita dapat melihat potensi yang ada di Pasar Bungur di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 1: Daftar Potensi Kios, Los, dan Pkl pada Pasar Bungur Kabupaten Bungo Tahun 2015

No	Nama Tempat	Jumlah
1	Kios	478
2	Los	350
3	Pedagang Kaki Lima/Pelataran	650

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, 2015

Dengan melihat tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa potensi yang ada dipasar Bungur sangat besar, tapi dalam pencapaian realisasi target retribusinya sangat sulit untuk tercapai.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada. Dengan data-data

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



yang ada serta hasil wawancara yang didapatkan diharapkan penelitian ini mampu memberi gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan dalam mengatasi tingginya tunggakan retribusi di pasar bungur Kabupaten Bungo.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi jenis dan sumbernya, yaitu: Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan instrument metode wawancara (Interview), yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait dan memiliki relevansi terhadap masalah penelitian, yaitu kepada instansi yang terkait terhadap pemungutan retribusi. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan focus penelitian. Observasi dilakukan dengan melihat langsung upaya yang dilakukan oleh dinas pengelolaan pasar dan kebersihan dalam mengatasi tingginya tunggakan retribusi di pasar bungur kabupaten bungo.

Berhubung penelitian ini adalah kualitatif, maka pihak yang di jadikan informan adalah orang yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di lokasi penelitian. Metode yang digunakan untuk menemukan informan kunci tersebut, maka penulis menggunakan "*purposive sampling*". Purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, munculnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjajah objek atau situasi sosial yang di teliti.¹ Yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang, antara lain dapat dilihat pada table 1 sebagai berikut :

Tabel 3: Jumlah Informan

No	Nama Pegawai	Jabatan	Jumlah
1	Masril, S.Sos., ME	Kepala Dinas	1 Orang
2	Harun Al Rasyid., S.E., M.Si	Kabid Pengelolaan Pasar	1 Orang
3	Ludwig Sinaga	Kasi Pembinaan dan Penempatan Pedagang	1 Orang
4	Ferry Indrawan	Staf pemungut retribusi	1 Orang
5	Sugiono	Staf pemungut retribusi	1 Orang
6	Pendijai	Pedagang Sayuran	1 Orang
7	Nurlelis	Pedagang Pakaian	1 Orang
8	Ratna	Pedagang Makanan	1 Orang
Total			8 Orang

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo. Karena, penulis melihat tingginya angka tunggakan retribusi khususnya pada retribusi pasar bungur Kabupaten Bungo. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015.

PEMBAHASAN

1. Upaya Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Dalam Mengatasi Tingginya Tunggakan Retribusi di Pasar Bungur Kabupaten Bungo

Pengelolaan Pasar Bungur (Pasar Atas) Kabupaten Bungo, secara struktural menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo. Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo Pasal 9 ayat (1), tugas tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Bidang

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, 2012. Alfabeta hal :218

Pengelolaan Pasar dalam rangka membantu tugas Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo. Selanjutnya Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain dibantu oleh Seksi Pengembangan Sumber Daya Pasar, Seksi Pembinaan dan Penempatan Pedagang dan Seksi Penertiban dan Keamanan Pasar (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2011). Pelaksanaan operasional Pasar Bungur Kabupaten Bungo secara langsung dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan.

Pasar Bungur Kabupaten Bungo merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di Kabupaten Bungo dimana memberikan kontribusi cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo merupakan lembaga atau organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola pemungutan retribusi pasar-pasar yang ada di Kabupaten Bungo. Sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengelola pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Bungo, maka pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo. Berdasarkan laporan akhir tahun dari Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, retribusi dari Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menghasilkan pendapatan retribusi paling banyak. Namun dalam pencapaian realisasinya sangat sulit tercapai.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh dinas pengelolaan pasar dan kebersihan dalam mengatasi tingginya tunggakan retribusi di pasar bungur, peneliti mengadakan wawancara dengan pihak-pihak struktural terkait dengan masalah tersebut. Di samping itu peneliti juga mengadakan wawancara dengan beberapa pedagang yang membuka usahanya di Pasar Bungur Kabupaten Bungo.

Mengadakan Sosialisasi Tentang Pentingnya Membayar Retribusi Untuk Pembangunan Daerah

Menurut Harun, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, ketika ditanyakan mengenai realisasi penerimaan dari retribusi Pasar Bungur menyatakan, bahwa berdasarkan laporan yang diterima pada tahun 2013 penerimaan dari retribusi Pasar Bungur pada tahun itu hanya sebesar Rp. 69.400.410. Selanjutnya beliau menambahkan, bahwa jumlah tersebut merupakan pemasukan selama satu tahun pada tahun 2013, sedangkan target realisasi penerimaan retribusi pada tahun tersebut sebesar Rp.78.000.000.² Penjelasan Harun, di atas didukung dengan data sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4: Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Bungur Kabupaten Bungo Tahun 2013

No	Bulan	Penerimaan (Rp)	Keterangan
1.	Januari	6.061.600	Penerimaan Retribusi Pada Tahun 2013 hanya 89%
2.	Februari	5.572.100	
3.	Maret	6.001.600	
4.	April	6.500.000	
5.	Mei	6.502.600	
6.	Juni	5.892.000	
7.	Juli	4.234.100	
8.	Agustus	4.806.800	
9.	September	5.396.600	
10.	Oktober	6.319.510	
11.	November	6.256.700	
12.	Desember	5.856.800	
Total		69.400.410	
Target		78.000.000	

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo

² Hasil wawancara dengan Harun Al-Rasyid, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo, tanggal 23 Maret 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian retribusi pada tahun 2013 yang lalu hanya 89%, sedangkan potensi yang di miliki oleh Pasar Bungur Kabupaten Bungo sangat lah besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. Ludwig Sinaga, selaku Kasi Pembinaan dan Penempatan Pedagang membenarkan data tersebut diatas. Selanjutnya beliau menambahkan penjelasan dengan mengatakan sebagai berikut :³

“Pada tahun 2013 yang lalu memang realisasi pencapaian target retribusi tidak tercapai, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, akan tetapi Dinas kami yang diberikan wewenang dalam pemungutan retribusi di pasar bungur selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD”

Zulkarnain, selaku Kasubbag Keuangan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan mengatakan :⁴

“Dalam upaya mengatasi tingginya tunggakan retribusi kami mengadakan sosialisasi kepada pemilik atau penghuni kios tentang pentingnya membayar retribusi untuk pembangunan daerah”

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya yang di lakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan dalam mengatasi tingginya tunggakan retribusi adalah mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar retribusi untuk pembangunan Daerah Kabupaten Bungo

Melakukan Penagihan Retribusi Secara Door to Door

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa petugas pungut retribusi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melakukan penagihan retribusi kepada wajib retribusi secara langsung. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan petugas pungut retribusi, senada dengan Zulkarnain, Sugiono mengatakan :⁵

“Untuk mengatasi tunggakan retribusi kami melakukan penagihan retribusi secara door to door kepada wajib retribusi”

Peneliti kembali mewawancarai Zulkarnain, selaku Kasubbag Keuangan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan :⁶

“Untuk memaksimalkan pendapatan PAD, kami telah melakukan kerja sama dengan instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu penagihan retribusi yang dalam hal ini bagi penunggak retribusi”

Selanjutnya peneliti mewawancarai seorang Pedagang kaki lima bernama pendijai yang usaha dagangnya menjual sayur-sayuran. Ketika ditanya mengenai kebenaran petugas retribusi yang setiap hari menagih, dia mengatakan sebagai berikut:⁷

“Petugas retribusi setiap hari memang nagih, tapi untuk saat ini harga karet sedang turun, jadi pembeli sedikit, bukannya tidak mau bayar retribusi, tapi untuk makan sehari-hari saja susah”

³ Hasil Wawancara dengan Ludwig Sinaga, Kasi Pembinaan dan Penempatan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo pada tanggal 23 Maret 2015.

⁴ Hasil Wawancara dengan Zulkarnain S,Sos., M.Si, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo pada tanggal 23 Maret 2015.

⁵ Hasil Wawancara dengan Sugiono, petugas pungut retribusi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, pada tanggal 23 Maret 2015

⁶ Hasil Wawancara dengan Zulkarnain S,Sos., M.Si, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo pada tanggal 23 Maret 2015

⁷ Hasil Wawancara dengan Pandijai, Penjual sayuran Pasar Bungur Kabupaten Bungo pada tanggal 24 Maret 2015

Sementara pada kesempatan yang sama, ratna penjual yang berdagang makanan di Pasar Bungur menjelaskan, bahwa petugas retribusi menagih terkadang di saat dagangannya belum laku sama sekali, itu menjadi salah satu faktor kenapa banyak pedagang yang tidak membayar retribusi.⁸ Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan selaku organisasi atau lembaga pemerintahan yang diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan retribusi di pasar bungur telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi tingginya tunggakan retribusi di pasar bungur kabupaten bungo, akan tetapi realisasi pencapaian target retribusi sangat sulit untuk tercapai.

Memberikan Target Penerimaan Retribusi Kepada Petugas Pungut Retribusi

Sumber Daya Manusia petugas pungut retribusi Pasar Bungur merupakan ujung tombak dalam meningkatkan pengelolaan pasar Bungur agar target retribusi bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan wawancara dengan Zulkarnain, Selaku Kasubbag Keuangan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan :⁹

“ Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, petugas pungut retribusi kami diberikan target penerimaan retribusi, dan apabila petugas tersebut tidak mencapai target, maka akan diberikan peringatan dan selanjutnya jika selama 3 bulan berturut turut petugas tersebut tidak mencapai target, maka petugas tersebut bisa diberhentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Kepala Dinas Pengelolaan dan Kebersihan Kabupaten Bungo, saat diwawancarai mengenai permasalahan tersebut mengatakan sebagai berikut:¹⁰

“Selama ini PAD dari penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bungo sebagian besar memang belum optimal termasuk dari Pasar Bungur Kabupaten Bungo. Banyak faktor menyebabkan kenapa masih tingginya tunggakan retribusi, salah satunya perekonomian masyarakat yang tidak stabil, berakibat pada nilai beli masyarakat yang rendah, sehingga pedagang sulit untuk membayar retribusi”

Dari penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan, bahwa tingginya tunggakan retribusi di pasar bungur kabupaten bungo disebabkan oleh perekonomian masyarakat yang tidak stabil sehingga banyaknya pedagang yang tidak membayar retribusi.

2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Pengelolaan Pasar Dan Kebersihan Dalam Mengatasi Tingginya Tunggakan Retribusi Di Pasar Bungur Kabupaten Bungo.

Indikasi banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo adalah jumlah penerimaan retribusi pasar masih belum mencapai target yang diharapkan. Dari hasil penelitian ditemukan berbagai hambatan yang ditemui oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo, sebagai berikut:

Tidak Adanya Sanksi Yang Tegas Bagi Wajib Retribusi Yang Tidak Membayar

Berdasarkan wawancara dengan Zulkarnain, tidak adanya sanksi yang tegas menjadi faktor utama penyebab tingginya tunggakan retribusi, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011, sanksi yang diterapkan bagi penunggak retribusi adalah sanksi administratif sebesar 2% dari pokok

⁸ Hasil Wawancara dengan Ratna, Penjual makanan di Pasar Bungur Kabupaten Bungo pada tanggal 24 Maret 2015

⁹ Hasil Wawancara dengan Zulkarnain, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo pada tanggal 24 Maret 2015

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Masril S,Sos., M.E, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo pada tanggal 24 Maret 2015

retribusi¹¹. Hal senada juga dikatakan oleh ferry indrawan, bahwa tidak adanya sanksi yang tegas kepada pedagang sehingga menyebabkan banyak pedagang yang tidak membayar retribusi.¹² Selain tidak adanya sanksi yang tegas, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya membayar retribusi terhadap pembangunan daerah menjadi salah satu faktor masih enggan nya pedagang untuk membayar retribusi.

Banyaknya Pemilik Yang Diberikan Izin Penempatan Menyewakan Kepada Orang Lain Atau Pedagang Lain Sehingga Penyewa Tidak Mempunyai Kewajiban Untuk Membayar Retribusi

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, banyaknya pemilik kios atau los yang diberikan izin penempatan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan menyewakan kiosnya kepada pedagang lain, sehingga penyewa merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi. Penulis melakukan wawancara dengan Nurlelis, Pedagang Pakaian mengatakan :¹³

“Saya menyewa tempat ini sudah 4 bulan yang lalu, dalam perjanjian sewa tersebut, pemilik kios yang akan membayar retribusi, jadi saya tidak mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi”

Ludwig Sinaga, selaku Kasi Pembinaan dan Penempatan Pedagang membenarkan data tersebut diatas. Selanjutnya beliau menambahkan penjelasan dengan mengatakan sebagai berikut:¹⁴

“Memang benar, banyak pemilik kios atau penghuni kios yang di berikan izin untuk menempati, menyewakan kembali kios nya kepada orang lain, sehingga penyewa kios tersebut merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi”

Dari penjelasan-penjelasan diatas menunjukkan, bahwa ternyata banyaknya pedagang yang diberikan izin penempatan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, menyewakan kembali kiosnya kepada pedagang lain, sehingga tunggakan retribusi menjadi semakin besar.

Situasi Perekonomian Yang Belum Stabil Khususnya Untuk Kota Muara Bungo Dalam 2 Tahun Terakhir.

Berdasarkan pengamatan penulis, situasi perekonomian yang belum stabil dalam 2 tahun terakhir mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar bungur kabupaten bungo. Menurut pandijai, pedagang sayuran di pasar bungur, harga karet yang rendah menyebabkan niat beli masyarakat rendah, hal ini menyebabkan dagangannya yang tidak laku habis terjual.¹⁵ Hal senada juga dikatakan oleh sugiono, petugas pungut retribusi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, pedagang enggan membayar retribusi dengan alasan dagangan yang belum laku.¹⁶ Penulis melihat faktor perekonomian merupakan hambatan dalam meningkatkan pendapatan retribusi di Pasar Bungur Kabupaten Bungo. Perekonomian yang belum stabil dalam kurun waktu dua tahun terakhir menyebabkan tingginya tunggakan retribusi di Pasar Bungur Kabupaten Bungo.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Zulkarnain S,Sos., M.Si, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo pada tanggal 24 Maret 2015.

¹² Hasil Wawancara dengan Ferry indrawan, Petugas Pungut retribusi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo pada tanggal 24 Maret 2015

¹³ Hasil Wawancara dengan Nurlelis, Pedagang Pakaian di Pasar Bungur Kabupaten Bungo pada tanggal 24 Maret 2015

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ludwig Sinaga, Kasi Pembinaan dan Penempatan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo pada tanggal 24 Maret 2015

¹⁵ Hasil Wawancara dengan pendijai, pedagang sayuran di Pasar Bungur Kabupaten Bungo pada tanggal 24 Maret 2015

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Sugiono, Petugas Pungut retribusi Dinas Pengelolaan Pasar dan kebersihan pada tanggal 24 Maret 2015

Upaya Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan dalam pengelolaan retribusi pasar khususnya di Pasar Bungur Kabupaten Bungo dampaknya sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi. Keadaan tersebut sangat merugikan bagi PAD Kabupaten Bungo, karena sumber penerimaan PAD Kabupaten Bungo yang terbesar adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo, dalam hal ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, berupaya untuk mencari jalan keluar agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi, diantaranya adalah:

Mengadakan Revisi Peraturan Daerah, Sehingga Ada Sanksi yang Tegas dan Jelas Terhadap Penunggak Retribusi

Peraturan yang tegas dan jelas merupakan ujung tombak dalam meningkatkan pendapatan retribusi Pasar Bungur agar target retribusi bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Peraturan Daerah yang ada saat ini belum memberikan efek jera kepada pedagang yang tidak membayar retribusi. Berdasarkan wawancara dengan Ferry Indrawan, bahwa untuk meningkatkan pendapatan di Pasar Bungur Kabupaten Bungo diperlukan Peraturan yang Tegas dan Jelas untuk memberikan efek jera kepada pedagang yang membandel atau enggan untuk membayar retribusi¹⁷. Hal senada juga diakui oleh Harun, bahwa Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan akan merencanakan revisi Peraturan Daerah agar di dalam peraturan tersebut terdapat sanksi yang tegas dan jelas agar dapat memberikan efek jera kepada pedagang yang enggan membayar retribusi.¹⁸

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis, bahwa kondisi real yang terjadi adalah lemahnya peraturan daerah dalam pemberian sanksi kepada wajib retribusi yang menunggak menyebabkan semakin tingginya tunggakan retribusi di Pasar Bungur Kabupaten Bungo. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 20, yaitu :

“Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)”

Pemberian sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) peneliti anggap masih belum memberikan efek jera kepada penunggak retribusi.

Membentuk Tim Terpadu Untuk Mengeksekusi Bagi Penunggak Retribusi

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo Masril, S.Sos. ME berencana membentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah (TTPPD). Tim ini bertugas untuk mengeksekusi bagi penunggak Retribusi yang telah diproses sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda).¹⁹ Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Harun Al Rasyid, bahwa pembentukan tim ini dilakukan karena selama ini pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Daerah belum memberikan efek jera kepada wajib retribusi yang enggan membayar. Untuk itu Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan berharap agar tim yang direncanakan dibentuk melibatkan pegawai sejumlah instansi terkait seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas pendapatan, dan satpol PP untuk bekerja maksimal.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ferry Indrawan, Petugas Pungut Retribusi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan pada tanggal 24 Maret 2015

¹⁸ Hasil Wawancara Wawancara dengan Harun Al Rasyid, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada tanggal 24 Maret 2015

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Masril. S.Sos, ME, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo pada tanggal 24 Maret 2015

KESIMPULAN

Pengelolaan Pasar Bungur (Pasar Atas) Kabupaten Bungo, secara struktural menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo. Pasar Bungur Kabupaten Bungo merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di Kabupaten Bungo dimana memberikan kontribusi cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo dalam mengatasi tingginya tunggakan Retribusi

1. Mengadakan sosialisasi kepada pemilik atau penghuni kios tentang pentingnya membayar retribusi untuk pembangunan daerah.
2. Untuk mengatasi tunggakan retribusi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo melakukan penagihan retribusi secara door to door kepada wajib retribusi.
3. Memberdayakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penegak Peraturan Daerah untuk membantu penagihan retribusi.
4. Memberikan Sanksi yang tegas kepada wajib retribusi yang tidak membayar.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan dalam mengatasi tingginya tunggakan retribusi di Pasar Bungur Kabupaten Bungo.

1. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi wajib retribusi yang tidak membayar.
2. Banyaknya pemilik yang diberikan izin penempatan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo menyewakan kembali kepada orang lain atau pedagang lain sehingga si penyewa merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi
3. Situasi perekonomian yang belum stabil khususnya untuk kota Muara Bungo dalam 2 (dua) tahun terakhir

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.bungokab.go.id/post/read/55/letak-geografis-dan-topografi.html>, diakses tanggal 20 Maret 2015 Pukul 13.30 Wib
- Kweit, Mary Grizes dan Kwiet, Robert W. 1986. *Konsep dan Metode Analisa Politik*. Jakarta: Bina Aksara
- Munawir, S. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Peraturan Daerah Kabupaten Buungo Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Buungo Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Buungo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Soemitro, Rochmat. 1974. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco
- Siahaan, Mariot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang nor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah